

KEMAMPUAN FISKAL DAN PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN KONAWA UTARA

Sardi

Mahasiswa Pascasarjana

Universitas Halu Oleo, Kendari

Email : Sardy.Ardy1@gmail.com

Muh. Yani Balaka

Universitas Halu Oleo, Kendari

Fajar Saranani

Universitas Halu Oleo, Kendari

-Abstaract

The purposes of the study were : 1) to find out the ability of financial, 2) economic growth, 3) relationship between financial ability and economic growth in North Konawe year 2009 – 2013. Data used in the study were primary and secondary data. Method of the study employed descriptive analysis by using tools : 1) financial ability through ratio indicator of financial performance comprised of : degree of financial decentralization, independency of regional financial, appropriateness of regional expenses and financial dependence. 2) to find out the growth of economic through the value of PDRB ADHK, 2000, and 3) to find out the relationship between financial ability and economic growth using a) PAD performance analysis comprised of PAD share, PAD growth, and b) financial ability (IKK).

Result of the study concluded that : 1) based on financial ability described that the ability of financial is low, this is shown by financial performance indicators, they are : decentralization of financial is very low, the independency of regional financial is low, the appropriateness of regional expenses to the total of regional expenses is not appropriate and the dependence to regional financial is high. 2) From the perspective of economic growth, in general, the growth of economic is rather good, with the averages of the growth is 8,05% per year. 3) the relationship between financial ability and economic growth is medium. This is shown by the indicator of PAD performance such as PAD share to medium expenses total. Higher PAD growth, elasticity of PAD to PDRB with the ratio of low elasticity. And the index of financial ability (IKK) is in the medium ability.

Keywords : financial ability, economic growth, PAD's performance, index of financial ability.

1.PENDAHULUAN

Dalam UU No. 32 Tahun 2004 dijelaskan bahwa otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar urusan pemerintah pusat yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Selain itu juga dilaksanakan pula dengan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip yang menegaskan

bahwa urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup, dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai bagian utama dari tujuan nasional. (Ariansyah : 2014)

Penyelenggaraan otonomi daerah harus selalu berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan selalu memperhatikan kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat. Pemerintah daerah diharapkan semakin mandiri, mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat, bukan hanya terkait dengan pembiayaan, tetapi juga terkait dengan kemampuan daerah. Untuk itu, otonomi daerah diharapkan dapat : menciptakan efisiensi dan efektivitas pengelolaan sumber daya daerah, meningkatkan kualitas pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam proses pembangunan. (Prakarsa : 2014).

Kontribusi penerimaan PAD terhadap APBD di Kabupaten Konawe Utara sepanjang tahun 2009 – 2013 cukuplah baik dengan rata-rata 62,82 persen, namun belum berkontribusi maksimal terhadap total pendapatan daerah, sebagaimana tercantum dalam APBD. APBD Kabupaten Konawe Utara masih bergantung pada penerimaan dari pemerintah pusat (Dana Perimbangan). Tampak bahwa kontribusi pendapatan terbesar dalam struktur APBD berasal dari dana perimbangan. Dengan ini pula dibuktikan pada realisasi pendapatan daerah terbesar adalah dana perimbangan sebagaimana tercantum pada Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 – 2013.

Sudiarsa (2004) menyatakan, laju pertumbuhan ekonomi akan mempengaruhi laju pertumbuhan kesempatan kerja. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi memungkinkan dapat menciptakan kesempatan kerja yang lebih luas. Kemajuan atau kemunduran pembangunan ekonomi daerah tercermin dari besarnya nilai produk domestik regional bruto (PDRB) yang dihitung atas dasar harga konstan 2000 (Priyanto : 2004). Menurut perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan 2000 selama periode tahun 2009 – 2013, laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara mengalami pertumbuhan positif yaitu dengan angka rata-rata sebesar 8,05% per tahun. Dengan sektor pertumbuhan rata-rata yang cukup baik adalah sektor Pertambangan dan Penggalian yaitu sebesar 24,64% per tahun. Sedangkan peranan sektor ekonomi yang paling dominan jika dilihat dari penerimaan nominal setiap tahun adalah sektor ekonomi pertanian, bangunan/konstruksi dan perdagangan, hotel dan restoran.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara jika ditinjau dari Indikator Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian

Kemampuan Fiskal (KKD), Keserasian Belanja Daerah serta Ketergantungan Fiskal)?

2. Bagaimana Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Konawe Utara?
3. Bagaimana Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara?

2. Tujuan Penelitian

Yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui Kemampuan Fiskal di Kabupaten Konawe Utara jika ditinjau dari Indikator Kinerja Keuangan (Derajat Desentralisasi Fiskal (DDF), Kemandirian Kemampuan Fiskal (KKD), Keserasian Belanja Daerah serta Ketergantungan Fiskal)?
2. Untuk Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Kabupaten Konawe Utara?
3. Untuk mengetahui Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara?

2.KAJIAN PUSTAKA

1. Kemampuan Fiskal Daerah

Kemampuan keuangan atau fiskal adalah kemampuan suatu daerah dalam menyediakan sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Badan Pusat Statistik (2009) menjelaskan Pertumbuhan ekonomi menunjukkan pertumbuhan produksi barang dan jasa di suatu wilayah perekonomian dan dalam selang waktu tertentu. Produksi tersebut diukur dalam nilai tambah (*value added*) yang diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi di wilayah bersangkutan yang secara total dikenal sebagai Produk Domestik Bruto (PDB)

Bank Indonesia (2014) menerangkan bahwa *Produk Domestik Regional Bruto* (PDRB) merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk

mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun atau pertumbuhan ekonomi yang tidak dipengaruhi oleh faktor harga.

3. Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Otonomi daerah ditunjukkan untuk meningkatkan kemandirian daerah. Salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kemandirian adalah Pendapatan Asli Daerah. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung. (Adi : 2012).

Peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya. (Hamzah : 2007).

3.METODE PENELITIAN

Objek dari penelitian yang dilakukan adalah Target APBD, Laporan Realisasi APBD Tahun 2009 – 2013 dan Data PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 Tahun 2009 - 2013. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data kuantitatif. data primer dan sekunder yang diperoleh dari beberapa sumber. teknik pengumpulan data : Wawancara dan Dokumentasi.

Variabel Penelitian

Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah : Kemampuan Fiskal, Pertumbuhan Ekonomi dan Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi.

Metode Analisis Data

Metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif (*Descriptive Analysis Method*)

Alat analisis untuk menguji kemampuan fiskal, pertumbuhan ekonomi, hubungan fiskal dan pertumbuhan ekonomi sebagai berikut :

a. Analisis Kemampuan Fiskal

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio ini dirumuskan sebagai berikut :

$$DDF = \frac{PAD}{TPD} \times 100\% \dots\dots\dots(1)$$

Keterangan :

DDF : Derajat Desentralisasi Fiskal

PAD : Pendapatan Asli Daerah

TPD : Total Pendapatan Daerah

Adapun kriteria untuk menetapkan desentralisasi fiskal daerah dapat dikategorikan seperti tabel 1 sebagai berikut :

Tabel 1 : Kriteria Penilaian Tingkat Desentralisasi Fiskal

Prosentase PAD terhadap TPD	Tingkat Desentralisasi Fiskal
0,00 - 10,00	Sangat Kurang
10,01 - 20,00	Kurang
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Baik
> 50,00	Sangat Baik

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma : 2010)

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

$$KKD = \frac{PAD}{BPP/Propinsi \text{ dan Pinjaman}} \times 100\% \dots\dots\dots(2)$$

Keterangan :

KKD : Kemampuan Keuangan Daerah

PAD : Pendapatan Asli Daerah

BPP : Bantuan Pemerintah Pusat

Pola hubungan pemerintah pusat dan daerah serta tingkat kemandirian dan kemampuan keuangan daerah dapat disajikan dalam matriks seperti tampak pada Tabel 2 berikut ini :

Tabel 2 : Kriteria Penilaian Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Keuangan	Rasio Kemandirian (%)
Rendah Sekali	0 – 25
Rendah	> 25 – 50

Sedang	> 50 – 75
Tinggi	> 75 – 100

Sumber : Batafor, 2011

3. Rasio Keserasian Belanja Daerah

$$RKB = \frac{\text{Belanja Pelayanan Publik}}{\text{Total Belanja Daerah}} \times 100\% \dots\dots\dots(3)$$

Keterangan :

RKB : Rasio Keserasian Belanja

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi belanja dan anggaran belanja daerah dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 3 : Kriteria Penilaian Keserasian Belanja

Keserasian Belanja Keuangan Daerah Otonom	Rasio Keserasian Belanja (%)
Tidak Serasi	0 – 20
Kurang Serasi	> 20 – 40
Cukup Serasi	> 40 – 60
Serasi	> 60 – 80
Sangat Serasi	> 80 – 100

Sumber : Batafor, 2011

4. Rasio Ketergantungan Fiskal

$$\text{Rasio KF} = \frac{\text{Total PAD}}{\text{Total Penerimaan APBD tanpa subsidi}} \times 100\% \dots\dots\dots(4)$$

Dengan mengetahui hasil perbandingan antara realisasi PAD dan Total Penerimaan Daerah Tanpa Subsidi dengan menggunakan ukuran efisiensi tersebut, maka penilaian kinerja keuangan dapat ditentukan sebagai berikut :

Tabel 4 : Kriteria Penilaian Ketergantungan Fiskal

Prosentase PAD terhadap Total Penerimaan Non Subsidi	Ketergantungan Keuangan Daerah
0,00 - 10,00	Sangat Rendah
10,01 - 20,00	Rendah
20,01 - 30,00	Sedang
30,01 - 40,00	Cukup
40,01 - 50,00	Tinggi
> 50,00	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri – Fisipol UGM, 1991 (dalam Bisma : 2010)

Pertumbuhan kinerja keuangan rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{r} = \frac{(r_1 + r_2 + r_3 \dots \dots \dots r_n)}{n} \dots \dots \dots (5)$$

Di mana :

\bar{r} adalah laju pertumbuhan kinerja keuangan rata-rata

1, 2, 3.....n adalah tahun pengamatan

b. Analisis Pertumbuhan Ekonomi

Untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi per tahun dapat digunakan rumus sebagai berikut :

$$g_t = \frac{PDRB_t - PDRB_{t-1}}{PDRB_{t-1}} \times 100\% \dots \dots \dots (6)$$

Keterangan :

g_t = Laju pertumbuhan ekonomi (*rate of growth*)

t = Tahun tertentu

$t-1$ = Tahun sebelumnya

$PDRB$ = Produk Domestik Regional Bruto

Pertumbuhan ekonomi rata-rata dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\bar{g} = \frac{(g_1 + g_2 + g_3 \dots \dots \dots g_n)}{n} \dots \dots \dots (7)$$

Di mana :

\bar{g} adalah laju pertumbuhan ekonomi rata-rata

1, 2, 3.....n adalah tahun pengamatan

c. Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Hubungan kemampuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Kinerja PAD dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) (Adi : 2012; Bisma : 2010). Dengan langka-langka sebagai berikut :

1. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* PAD, *growth* PAD dan *elastisitas* (Adi : 2012)

$$\text{Share PAD} = \frac{\text{PAD}_t}{\text{Total Belanja}} \times 100\% \dots\dots\dots(8)$$

$$\text{Growth PAD} = \frac{\text{PAD}_t - \text{PAD}_{t-1}}{\text{PAD}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(9)$$

$$\text{Elastisitas} = \frac{\text{Growth PAD}}{\text{Pertumbuhan Ekonomi}} \times 100\% \dots\dots(10)$$

$$\text{Pertumbuhan Ekonomi} = \frac{\text{PDRB}_t - \text{PDRB}_{t-1}}{\text{PDRB}_{t-1}} \times 100\% \dots\dots\dots(11)$$

Keterangan :

- PAD_t = Pendapatan Asli Daerah tahun t
- PAD_{t-1} = Pendapatan Asli Daerah tahun t-1
- PDRB_t = Produk Domestik Regional Bruto t
- PDRB_{t-1} = Produk Domestik Regional Bruto t-1

2. Menyusun Indeks untuk setiap komponen Indeks Kemampuan Keuangan
 Indeks ini diperoleh dengan menggunakan persamaan berikut :

$$\text{Indeks X} = \frac{\text{Nilai hasil pengukuran} - \text{Nilai X kondisi minimum}}{\text{Nilai X kondisi maksimum} - \text{Nilai X kondisi minimum}} \dots (12)$$

Dari persamaan tersebut, kemudian dihitung IKK yang diperoleh dari persamaan berikut ini :

$$\text{IKK} = \frac{\text{XS} + \text{XG} + \text{XE}}{3} \dots\dots\dots(13)$$

Keterangan :

- XS = Indeks *Share* PAD terhadap belanja
- XG = Indeks *Growth* (Pertumbuhan PAD)
- XE = Indeks Elastisitas pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Tabel 5 : Kriteria Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah

Indeks Kemampuan Keuangan	Klasifikasi
0,00 – 0,33	Rendah
0,34 – 0,43	Sedang
0,44 – 1,00	Tinggi

Sumber : Bappenas, 2003, Bisma : 2010, Adi : 2012

3.HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Kemampuan Fiskal

1. Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal

Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2009 – 2013 diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total Pendapatan daerah.

Tabel 6 : Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal Kab. Konawe Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Total Pendapatan Daerah (Rp)	DDF (%)
2009	5.785.823.216,00	336.177.169.767,00	1,72
2010	14.956.169.891,00	359.594.615.084,00	4,16
2011	7.647.158.443,00	411.574.245.165,00	1,86
2012	30.436.926.981,00	511.800.919.213,00	5,95
2013	23.118.975.645,00	581.827.823.127,00	3,97
Rata-rata			3,53

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Menurut uraian dan perhitungan diatas dapat disimpulkan bahwa rasio derajat desentralisasi fiskal selama lima tahun pada masih dalam skala interval yang *sangat kurang*, karena masih berada dalam skala interval antara 0,00% - 10,00% dan ini berarti bahwa PAD mempunyai kemampuan yang *sangat kurang* dalam membiayai pembangunan daerah. Hal ini terjadi karena PAD di Kabupaten Konawe Utara masih relatif kecil bila dibandingkan dengan total pendapatan daerah. Kabupaten Konawe Utara dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan masih sangat tergantung pada sumber keuangan yang berasal dari Pemerintahan Pusat/Pemerintah propinsi.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Trend realisasi PAD Provinsi NTB yang kurang stabil turut mempengaruhi besarnya ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Kecenderungan ini disebabkan masih rendahnya kinerja pemungutan pajak daerah yang diserahkan oleh pemerintah pusat dalam kerangka desentralisasi fiskal. Dan temuan penelitian Situngkir (2014) menunjukkan bahwa Pendapatan pemerintah kabupaten/kota se Sumatera Utara masih didominasi oleh dana perimbangan yang berasal dari transfer pemerintah pusat. Hal ini menunjukkan bahwa

pemerintah kabupaten/kota di Provinsi Sumatera Utara masih sangat tergantung dengan pemerintah pusat dalam melakukan pembangunan. Dan juga searah dengan temuan penelitian Ariansyah (2013) yang menunjukkan bahwa rata-rata dalam kurun waktu 11 tahun (2000 s/d 2010) di Kota Jambi diperoleh proporsi PAD terhadap TPD sebesar 9,6 persen dan proporsi Dana Perimbangan terhadap TPD rata-rata sebesar 90,4 persen, ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kota Jambi masih belum siap dalam menghadapi otonomi daerah ini teriindikasi dari masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat.

2. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio tingkat kemandirian keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan dana yang diterima dari pemerintah pusat, provinsi dan pinjaman.

Tabel 7 : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kab. Konawe Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Bantuan Pemerintah Pusat/ Propinsi + Pinjaman (Rp)	KKD (%)
2009	5.785.823.216,00	326.126.540.761,00	1,77
2010	14.956.169.891,00	319.373.445.193,00	4,68
2011	7.647.158.443,00	403.728.086.722,00	1,89
2012	30.436.926.981,00	478.248.626.882,00	6,36
2013	23.118.975.645,00	539.612.449.304,00	4,28
Rata-rata			3,89

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Berdasarkan Tabel 7, diketahui bahwa pada periode 2009, rasio kemandirian pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencapai sebesar 1,77 persen, namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2010 sebesar 4,68 persen, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,89 persen, dan mengalami peningkatan pada angka tertinggi di tahun 2012 yaitu menjadi 6,36 persen. Kemudian turun di tahun 2013 menjadi 4,28 persen. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio kemandirian pada periode 2009 - 2013 sebesar 3,89 persen dan bila dihubungkan dengan Tabel 2, kriteria penilaian kemandirian keuangan daerah, maka persentasenya terletak antara 0 – 25 persen, dengan demikian rasio kemandirian pada periode 2009 – 2013 tergolong dalam kategori kemandirian *rendah sekali*. Sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana transfer pemerintah pusat dan provinsi dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Atau peranan Pemerintah Pusat sangat dominan dari pada daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Provinsi NTB selama periode TA 2003 – 2007 memiliki kemandirian keuangan sangat kurang sehingga memiliki ketergantungan tinggi terhadap bantuan pemerintah pusat melalui dana perimbangan dalam melaksanakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Dan temuan penelitian Arifin (2015) yang menunjukkan bahwa Provinsi Riau selama periode TA 2005 – 2013 memiliki kemandirian keuangan daerah sangat rendah, atau pengaruh pendapatan asli daerah terhadap kemandirian keuangan sangat rendah. Sehingga disarankan kepada pemerintah daerah agar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah dengan cara lebih mengoptimalkan penerimaan dari retribusi dan pajak serta faktor dari pendapatan asli daerah lainnya.

3. Rasio Keserasian Belanja Daerah

Rasio keserasian belanja menggambarkan bagaimana pemerintah Kabupaten Konawe Utara memprioritaskan alokasi dananya pada belanja pelayanan publik secara optimal yang diukur dengan membandingkan realisasi total belanja publik (belanja modal) dengan total belanja daerah dalam satuan persen.

Tabel 8 : Rasio Keserasian Belanja Daerah Kab. Konawe Utara

Tahun	Realisasi Belanja Modal (Rp)	Realisasi Total Belanja Daerah (Rp)	KBD (%)
2009	121.446.285.957,00	328.548.687.032,50	36,96
2010	106.331.995.002,00	326.598.524.400,00	32,56
2011	172.086.388.292,18	390.923.086.159,18	44,02
2012	147.718.981.623,00	454.469.726.411,00	32,50
2013	200.741.954.285,00	542.400.775.345,50	37,01
Rata-rata			36,61

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Berdasarkan Tabel 8 diketahui bahwa pada periode 2009, rasio keserasian belanja pemerintah Kabupaten Konawe Utara pada tahun 2009 yaitu sebesar 36,96 persen, pada tahun 2010 mengalami penurunan yaitu sebesar 32,56 persen, pada tahun 2011 mencapai tingkat keserasian tertinggi yaitu sebesar 44,02 persen dan pada tahun 2012 menurun menjadi 32,50 persen. Dan ditahun berikutnya mengalami penurunan kembali menjadi 37,01 persen. Secara rata-rata hasil perhitungan rasio keserasian belanja pada periode 2009 - 2013 sebesar 36,61 persen, bila dihubungkan dengan Tabel 3 kriteria keserasian belanja keuangan daerah otonom maka rasio keserasian belanja pemerintah Kabupaten Konawe Utara dikategorikan *kurang serasi* kerana persentasenya antara >20 – 40 persen.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Batafor (2011) yang menunjukkan bahwa tingkat keserasian belanja pemerintah Kabupaten Lambata pada periode II mengalami penurunan, hal ini disebabkan oleh tingginya realisasi belanja daerah berupa belanja aparatur, belanja administrasi umum dan operasi dan pemeliharaan yang jumlahnya tidak signifikan. Dan temuan penelitian Situngkir (2014) yang menunjukkan bahwa Realisasi Belanja Modal Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara Tahun 23,53 persen dari total belanja. Hal ini searah dengan pendapatan Situngkir (2015) yang menyatakan bahwa anggaran belanja daerah akan tidak logis jika proporsi anggarannya lebih banyak untuk belanja rutin, terutama untuk belanja pegawai. Tetapi tidak sejalan dengan pendapatan Bafator (2011) dan Adi (2006) yang menyatakan bahwa belanja publik (modal) secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat, berbagai belanja (investasi modal) yang dialokasi pemerintah, hendaknya memberikan manfaat langsung bagi masyarakat dan digunakan untuk pembangunan fasilitas modal yang dibutuhkan bagi pertumbuhan ekonomi. Dan tidak searah dalam penelitian Hariyanto (2012) yang menyatakatan bahwa peningkatan belanja pelayanan publik, khususnya belanja modal tersebut tentunya akan meningkatkan stok modal daerah, sehingga akan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah dan memperluas kesempatan kerja yang pada akhirnya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4. Rasio Ketergantungan Fiskal

Rasio tingkat ketergantungan keuangan daerah diukur dengan membandingkan perolehan PAD dengan total penerimaan APBD tanpa Subsidi (Dana Perimbangan). Total Penerimaan APBD adalah total penerimaan daerah yang diperoleh dari semua pendapatan daerah yang berasal dari masing-masing komponen pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah. (Bisma : 2010)

Tabel 9 : Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah Kab. Konawe Utara

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Penerimaan Daerah Non Subsidi (Rp)	KF (%)
2009	5.785.823.216,00	12.487.273.303,00	46,33
2010	14.956.169.891,00	44.277.355.109,54	33,79
2011	7.647.158.443,00	7.846.158.443,00	97,46
2012	30.436.926.981,00	33.552.292.331,00	90,71
2013	23.118.975.645,00	43.695.784.578,00	52,91
Rata-rata			64,24

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Tingkat ketergantungan keuangan daerah berdasarkan hasil perhitungan rasio antara PAD dengan Penerimaan APBD tanpa subsidi pada Tabel 10 menunjukkan peningkatan persentase yang berfluktuatif. Pada tahun anggaran 2009 tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat sebesar 46,33 persen, turun pada tahun anggaran 2010 menjadi 33,79 persen, kemudian naik pada angka tertinggi pada tahun anggaran 2011

menjadi 97,46 persen dan pada tahun anggaran 2012 turun menjadi 90,71 persen. Pada periode tahun anggaran 2013 kembali turun menjadi 52,91 persen. Rata-rata tingkat ketergantungan keuangan daerah Kabupaten Konawe Utara terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode tahun anggaran 2009-2013 adalah 64,24 persen. Apabila diklasifikasikan menurut kriteria penilaian tingkat ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat dan provinsi dengan tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah **Sangat Tinggi** (Lihat Tabel 4 : Kriteria Penilaian Ketergantungan Keuangan Daerah). Ini menunjukkan bahwa kemampuan keuangan pemerintah daerah Kab. Konawe Utara belum siap dalam menghadapi otonomi daerah ini terindikasi dari masih tingginya tingkat ketergantungan terhadap pemerintah pusat dan provinsi.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa Rata-rata tingkat kergantungan keuangan daerah Provinsi NTB terhadap pemerintah pusat pada kurun waktu periode angaran 2003 – 2007 sangat tinggi. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja PAD maupun sumber pendapatan daerah lainnya belum optimal dalam membiayai aktifitas pembangunan daerah, sehingga daerah masih sangat bergantung dengan adanya subsidi pemerintah melalui Dana Perimbangan. Tetapi tidak edentik dengan temuan penelitian Arifin (2015) yang menunjukkan tingkat ketergantungan pemerintah daerah Provinsi Riau terhadap pemerintah pusat sedang.

Dari hasil analisis Kemampuan fiskal pada tabel 9 – 12 diatas dengan menggunakan indikator kinerja keuangan maka dapat dilihat rata-rata dari masing-masing rasio sebagai berikut :

Tabel 10 : Kemampuan Fiskal (Rasio Indikator Kinerja) Daerah Kab. Konawe Utara TA. 2009 – 2013

Nomor	Jenis Rasio	Nilai Rata2 (%)	Kriteria Penilaian
1	Derajat Desentralisasi Fiskal	3,53	Sangat Kurang
2	Kemandirian Keuangan Daerah	3,89	Rendah Sekali
3	Keserasian Belanja Daerah	36,61	Kurang Serasi
4	Ketergantungan Fiskal	64,24	Sangat Tinggi
Rata-Rata Kemampuan Fiskal		27,07	Rendah

Sumber : Rekapitulasi Rasio Kemampuan Fiskal (diolah)

Berdasarkan analisis analisis kemampuan fiskal diatas dengan menggunakan indikator kinerja keuangan, secara umum Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2009-2013 menggambarkan kinerja yang tidak optimal dalam pelaksanaan otonomi daerah, hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain : Ketergantungan Keuangan

Daerah *Sangat Tinggi* terhadap Pemerintah Pusat sehingga tingkat Kemandirian Daerah *Rendah Sekali*. Desentralisasi Fiskal *Sangat Kurang* mengingat ketergantungan keuangan terhadap pemerintah pusat sangat tinggi. Keserasian belanja pembangunan terhadap total belanja daerah *kurang serasi*, hal ini menunjukkan kemampuan daerah untuk menyediakan belanja pembangunan relatif rendah dan belum mampu melakukan investasi jangka panjang yang secara langsung dimaksudkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Dari kondisi kinerja keuangan Pemerintah tersebut menunjukkan kemampuan daerah dalam menyediakan sumber-sumber keuangan asli daerah untuk memenuhi kebutuhannya guna mendukung berjalannya sistem pemerintahan, pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan daerahnya *Rendah*. Atau kemampuan fiskal rendah. Hal ini bertolak belakang dengan amanat otonomi daerah yang menunjukkan kemandirian daerah dan kewenangan luas dalam menyelenggarakan urusan rumah pemerintah daerah.

b. Variabel Pertumbuhan Ekonomi

Untuk mengetahui lebih jelas mengenai perkembangan PDRB berdasarkan harga kostan tahun 2000 serta pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara selama periode 2009-2013, dapat dilihat pada tabel 11 sebagai berikut :

Tabel 11 : PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000 dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi di Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013 (Juta Rupiah; %)

TAHUN	Atas Dasar Harga Konstan 2000	
	PDRB (Rp)	Pertumbuhan Ekonomi (%)
2009	336.098,79	-
2010	363.742,74	8,22
2011	396.499,96	9,01
2012	425.956,93	7,43
2013	457.989,50	7,52
Rata-Rata		8,05

Sumber : Data diolah 2009 – 2013

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Konawe Utara yang digambarkan oleh PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2000, dari tahun 2009 sampai dengan 2013 rata-rata pertumbuhannya mencapai 8,05 persen pertahun, dimana laju pertumbuhan ekonomi tahun 2011 merupakan angka tertinggi yang mencapai 9,01 persen. Pada tahun 2010 pertumbuhan ekonomi mencapai 8,22 persen. Pada tahun 2012 mengalami sedikit penurunan hingga mencapai 7,43 persen, kemudian tahun 2013 kembali meningkat sebesar 7,52 persen.

Hasil penelitian ini mendukung temuan hasil penelitian Hariyanto (2012) yang menunjukkan bahwa Pertumbuhan ekonomi Provinsi Jambi dari tahun 2000 sampai dengan 2009 rata-rata pertumbuhannya yang cukup baik. Kondisi ini menunjukkan bahwa adanya upaya pemerintah daerah untuk mendorong dan meningkatkan nilai tambah di semua unit usaha atau sektor ekonomi per tahun.

Hasil penelitian ini mendukung temuan hasil penelitian Adi (2012) yang menunjukkan bahwa kecenderungan peningkatan Pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota secara umum pada tiap provinsi se Jawa – Bali. Rerata pertumbuhan ekonom dalam tiga tahun terakhir pengamatan (2001 – 2004) mengalami peningkatan, kecuali untuk Provinsi Jawa Barat. Realitas ini memberikan indikasi positif adanya upaya keras dari pemerintah kabupaten dan kota untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, baik pengembangan dan pembangunan infrastruktur pendukung, melakukan reformasi birokrasi yang selama ini menghambat tumbuhnya investasi, maupun melakukan berbagai kebijakan strategis terkait lainnya.

c. Variabel Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi

Keterkaitan kemampuan keuangan atau fiskal dan pertumbuhan ekonomi dapat diukur dengan menggunakan Kinerja PAD dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) sebagai berikut

1. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share*, *growth* dan *elastisitas*

Tabel 12 : Share PAD Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Realisasi Total Belanja Daerah (Rp)	Share PAD (%)
2009	5.785.823.216,00	328.548.687.032,50	1,761
2010	14.956.169.891,00	326.598.524.400,00	4,579
2011	7.647.158.443,00	390.923.086.159,18	1,956
2012	30.436.926.981,00	454.469.726.411,00	6,697
2013	23.118.975.645,00	542.400.775.345,50	4,262
Rata-rata			3,851

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Berdasarkan Tabel 12, diketahui bahwa pada periode 2009, Share PAD pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencapai sebesar 1,761 persen, namun di tahun berikutnya mengalami kenaikan, yaitu di tahun 2010 sebesar 4,579 persen, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar 1,956 persen, dan mengalami peningkatan pada angka tertinggi di tahun 2012 yaitu menjadi 6,697 persen. Kemudian turun di tahun 2013 menjadi 4,262 persen. Secara rata-rata hasil perhitungan *Share PAD* pada periode 2009 - 2013 sebesar 3,851 persen.

Hasil penelitian ini identik dengan Adi (2012) yang menunjukkan semakin rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Dan identik dengan Setiaji (2007) yang menyatakan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan semakin kecilnya kontribusi PAD terhadap total belanja :

- a. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh Pemda akan tetapi berada di luar wewenang Pemda
- b. Rendahnya tingkat hidup dan ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan per kapita
- c. Kurang mampunya Pemda dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

Tabel 13 : Growth PAD Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Realisasi PAD (Rp)	Growth PAD (%)
2009	5.785.823.216,00	-
2010	14.956.169.891,00	158,50
2011	7.647.158.443,00	-48,87
2012	30.436.926.981,00	298,02
2013	23.118.975.645,00	-24,04
Rata-Rata		95,90

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran (diolah)

Berdasarkan Tabel 13, diketahui bahwa pada periode 2010, pertumbuhan PAD pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencapai sebesar 158,497 persen, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu di tahun 2011 sebesar -48,869 persen, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada angka tetinggi yaitu menjadi 298,016 persen. namun di tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi -24,043 persen. Secara rata-rata hasil perhitungan *Growth PAD* pada periode 2009 - 2013 sebesar 95,90 persen.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Setiaji (2007) yang menunjukkan bahwa rata-rata PAD periode sesudah otonomi daerah di kabupaten dan kota se Jawa – Bali mengalami peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dapat diartikan bahwa pemerintah daerah era otonomi mulai menggali potensi-potensi pendapatan asli dari daerahnya sehingga PAD dapat meningkat cukup tinggi.

Tabel 14 : Elastisitas Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Growth PAD (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Elastisitas (%)
2009	0,00	0,00	-
2010	158,50	8,22	19,27
2011	-48,87	9,01	-5,427
2012	298,02	7,43	40,112
2013	-24,04	7,52	-3,197
Rata-rata			12,690

Sumber : Laporan Realisasi Anggaran dan BPS Kab. Konawe Utara (diolah)

Berdasarkan Tabel 14, diketahui bahwa pada periode 2010, Elastisitas pemerintah Kabupaten Konawe Utara mencapai sebesar 19,270 persen, namun di tahun berikutnya mengalami penurunan yang cukup signifikan, yaitu di tahun 2011 sebesar -5,427 persen, pada tahun 2012 mengalami peningkatan pada angka tetinggi yaitu menjadi 40,112 persen. namun di tahun 2013 mengalami penurunan kembali menjadi -3,197 persen. Secara rata-rata hasil perhitungan *Elastisitas* pada periode 2009 - 2013 sebesar 12,690 persen. Dari hasil perhitungan diketahui bahwa dengan menggunakan PDRB ADHK, laju pertumbuhan PDRB berpengaruh terhadap peningkatan PAD meskipun hanya kecil, yaitu bila PDRB meningkat 1 persen maka PAD akan meningkat sebesar 12,69 persen. Ini berarti bahwa dengan perubahan pertumbuhan ekonomi sebesar 1 persen akan mampu meningkatkan PAD yang besar, yaitu

sebesar persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap perubahan PDRB tahun t tersebut sensitif terhadap perubahan/peningkatan PAD.

Hasil penelitian ini identik temuan hasil penelitian Adi (2012) yang menunjukkan bahwa nilai elastisitas daerah se Jawa – Bali pada era otonomi menunjukkan angka lebih besar dari 1. Hal ini peningkatan PAD sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan PAD, kenaikan PAD sebenarnya merupakan akses dari peningkatan pertumbuhan ekonomi dan juga pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan PDRB (ekonomi).

2. Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)

Indeks Kemampuan Keuangan diukur dengan menghitung rata-rata dari rata-rata indeks *growth*, indeks *share* dan indeks *elastisitas*.

a. Indeks *Share* PAD (XS)

Tabel 15 : Indeks Peran PAD (Share) Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Nilai Pengukuran (%)	Kondisi Maks. (%)	Kondisi Min. (%)	Indeks (XS) (%)
2009	1,761	6,697	1,761	-
2010	4,579	6,697	1,761	0,571
2011	1,956	6,697	1,761	0,040
2012	6,697	6,697	1,761	1
2013	4,262	6,697	1,761	0,507
JUMLAH				2,117
Nilai XS : Jumlah XS : 5 Tahun				0,42

b. Indeks *Growth* (XG)

Tabel 16 : Indeks Pertumbuhan PAD (Growth) Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Nilai Pengukuran (%)	Kondisi Maks. (%)	Kondisi Min. (%)	Indeks (XG) (%)
2009	0,00	298,016	-48,869	0,141
2010	158,497	298,016	-48,869	0,598
2011	-48,869	298,016	-48,869	0
2012	298,016	298,016	-48,869	1
2013	-24,043	298,016	-48,869	0,072
JUMLAH				1,810
Nilai XG : Jumlah XS : 5 Tahun				0,36

c. Indeks *Elastisitas* (XE)

Tabel 17 : Indeks Elastisitas Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Tahun	Nilai Pengukuran (%)	Kondisi Maks. (%)	Kondisi Min. (%)	Indeks (XE) (%)
-------	----------------------	-------------------	------------------	-----------------

2009	0	40,114	-5,427	0,119
2010	19,270	40,114	-5,427	0,542
2011	-5,427	40,114	-5,427	0
2012	40,114	40,114	-5,427	1
2013	-3,197	40,114	-5,427	0,049
JUMLAH				1,710
Nilai XG : Jumlah XE : 5 Tahun				0,34

Jadi Indeks Kemampuan Keuangan Daerah (IKK) :

Tabel 18 : Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Nomor	JENIS INDEKS	NILAI INDEKS (%)
1	Indeks Share PAD (XS)	0,42
2	Indeks Growth (XG)	0,36
3	Indeks Elastisitas (XE)	0,34
Jumlah		1,13
IKK (Jumlah Nilai Indeks : 3)		0,38

Berdasarkan Tabel diatas memberikan gambaran bahwa secara umum nilai Indeks Kemampuan Keuangan, yaitu dari rata-rata IKK sebesar 0,38 persen dengan kategori Kemampuan Keuangan Kabupaten Konawe Utara *Sedang*. Kondisi kemampuan keuangan tersebut terlihat bahwa sudah mulai mengalami perubahan yang cukup berarti. Kemampuan keuangan menunjukkan adanya pergeseran kemampuan keuangan daerah ke arah yang lebih baik. Salah satu faktor yang menyebabkan perubahan kemampuan keuangan ini adalah tingkat pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi lokal dan pada gilirannya meningkatkan kinerja (kemampuan) keuangan daerah.

Hasil penelitian ini mendukung temuan penelitian Adi (2012) yang menunjukkan bahwa IKK Kabupaten/kota se Jawa – Bali adanya pergeseran peta kemampuan keuangan yang cukup menonjol setelah otonomi daerah dengan IKK sedang. Dan mendekati dengan Temuan hasil penelitian Bisma (2010) yang menunjukkan bahwa IKK Provinsi NTB dengan kemampuan keuangan tinggi yaitu sebesar 0,54 persen. Tingginya tingkat kemampuan keuangan daerah disebabkan karena subsidi atau bantuan keuangan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan.

Hasil analisis tersebut menunjukkan terjadinya perbedaan dari variabel-variabel IKK, perbedaan cukup nyata terjadi pada keseluruhan variabel, baik pertumbuhan (*Growth*) PAD, peran (*share*) PAD terhadap belanja dan juga variabel *elastisitas* pertumbuhan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun demikian perbedaan yang terjadi pada peran (*share*) PAD sebenarnya justru tidak diharapkan. Peran PAD yang seharusnya menunjukkan kenaikan justru mengalami penurunan peran yang signifikan 3,85 persen. Hasil Temuan ini identik dengan Setiaji (2007) yang menunjukkan bahwa peran PAD untuk mendanai belanja daerah (*share*) justru mengalami penurunan yang signifikan. Dan juga identik dengan Adi (2012) yang menunjukkan semakin rendahnya kontribusi PAD dalam membiayai pengeluaran daerah. Dan memberikan fakta empirik terjadinya fenomena *Flypaper Effect*, yaitu adanya kecenderungan ketergantungan pemerintah daerah (kabupaten) Konawe Utara yang sangat tinggi terhadap penerimaan dari pemerintah pusat yang berupa dana perimbangan, baik dana alokasi umum, dana alokasi khusus maupun dana bagi hasil dan juga penerimaan dari

pemerintah provinsi. Penurunan peran PAD ini tentu saja bukan sepenuhnya menjadi kesalahan daerah mengingat sangat terbatasnya potensi-potensi PAD yang dapat digali daerah. Sumber-sumber penerimaan potensial justru dikelola langsung oleh pemerintah pusat dan provinsi, sementara disisi lain upaya peningkatan PAD melalui pajak ataupun retribusi daerah bisa jadi tidak efektif karena sangat membebani masyarakat. Dan hasil penelitian ini juga konsisten dengan Setiaji (2007) menyatakan bahwa dalam era otonomi seharusnya peran PAD semakin besar dalam membiayai berbagai belanja daerah dan ketergantungan terhadap pemerintah pusat harus mekin kecil.

Dampak (Elastisitas) Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemampuan Fiskal

Analisis Deskripsi dengan menggunakan analisis kinerja PAD menunjukkan bahwa dari tiga variabel IKK, dua diantaranya yaitu Elastisitas (pertumbuhan PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi) dan variabel peran (*share*) PAD merupakan variabel penting yang mempengaruhi nilai IKK, variabel *elastisitas* mempunyai peran yaitu sebesar 0,34 atau 34 persen. Hal ini berarti indeks dari variabel ini mempengaruhi IKK (lihat tabel 20), sedangkan sisanya dipengaruhi oleh indeks atau variabel lain. Dari hasil analisis ini menunjukkan bahwa upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah *sedang*. Kondisi ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Hasil Penelitian ini mendukung temuan penelitian Adi (2006) yang menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi mempunyai pengaruh terhadap penerimaan daerah. Dan konsisten dengan Adi (2012) yang menyatakan bahwa semakin tinggi elastisitas maka IKK akan semakin tinggi atau dengan kata lain upaya akan peningkatan kemampuan keuangan daerah akan lebih cepat terwujud apabila daerah (kabupaten) mengupayakan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Peningkatan pertumbuhan ekonomi akan mendorong peningkatan PAD yang lebih besar. Kenaikan PAD sebenarnya merupakan eksis dari peningkatan pertumbuhan ekonomi. dan Sejalan dengan Temuan Bappenas (2003) yang menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan PDRB (Ekonomi). Dan Konsisten dengan Hamzah (2007) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Adanya kenaikan PAD akan memicu dan memacu pertumbuhan ekonomi daerah menjadi lebih baik dari pertumbuhan ekonomi sebelumnya. Kenaikan PAD juga dapat mengoptimalkan dan meningkatkan aktivitas pada sektor-sektor yang terkait dengan pertumbuhan ekonomi, seperti sektor industri dan perdagangan, sektor jasa, dan sektor-sektor lainnya.

Hasil penelitian ini juga konsisten dengan Adi (2006) yang menyatakan bahwa peningkatan PAD sebenarnya merupakan eksis dari pertumbuhan ekonomi. Daerah yang pertumbuhan ekonominya positif mempunyai kemungkinan mendapatkan kenaikan PAD. Dari perspektif ini seharusnya pemerintah daerah lebih berkonsentrasi pada pemberdayaan kekuatan ekonomi lokal untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi daripada sekedar mengeluarkan produk perundangan terkait dengan pajak ataupun retribusi.

Berdasarkan hasil analisis Kinerja PAD dan Indeks Kemampuan di atas maka dapat dilihat lebih jelas hubungan kemampuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi Kab. Konawe Utara pada tabel 19 sebagai berikut :

Tabel 19 : Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Kabupaten Konawe Utara, Tahun 2009-2013

Nomor	Uraian	Nilai (%)	Kriteria
1	<i>Share</i> PAD	3,85	Rendah
2	<i>Growth</i> PAD	95,90	Tinggi
3	Elastisitas	12,69	Rendah
4	Indeks Kemampuan Keuangan (IKK)	38	Sedang
Jumlah		150,44	
Rata-Rata Hubungan		37,61	Sedang

Sumber : Nilai Kinerja PAD dan IKK (diolah)

Berdasarkan Tabel 19 rekapitulasi hubungan kemampuan fiskal dan pertumbuhan ekonomi daerah diatas dengan menggunakan indikator kinerja PAD, dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) secara umum Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2009-2013 menggambarkan hubungan *Sedang*. Hal ini ditunjukkan oleh rata-rata indikator kinerja PAD yang antara lain : *Share* PAD terhadap belanja daerah (APBD) *Redah*, artinya kemampuan daerah dalam membiayai kegiatan rutin dan kegiatan pembangunan *rendah*. *Growth* PAD *Tinggi*, artinya kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya dalam mendapatkkn PAD dari periode ke periode sangat baik (*Tinggi*). Nilai *Elastisitas* yang *Rendah*, artinya sensitivitas atau *elastisitas* PAD terhadap perkembangan ekonomi daerah Kab. Konawe Utara *Rendah*. Dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) yang menunjukkan nilai rata-rata *Sedang*. Dengan kondisi tersebut menunjukkan bahwa otonomi daerah belum terbukti membuat Pemerintah daerah Kabuputen Konawe Utara lebih kreatif dalam mengembangkan potensi ekonomi lokalnya. Pemberian otonomi menjadikan daerah lebih sensitif dan lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

5.KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Berdasarkan analisis kemampuan fiskal daerah, secara umum Kabupaten Konawe Utara pada Tahun Anggaran 2009-2013 memiliki kemampuan fiskal *Rendah*. Hal ini ditunjukkan oleh indikator kinerja keuangan yang antara lain : Desentralisasi Fiskal *Sangat Kurang*, Kemandirian Keuangan Daerah *Rendah Sekali*, Keserasian belanja pembangunan terhadap total belanja daerah *Kurang Serasi* dan Ketergantungan Fiskal Daerah *Sangat Tinggi*.
2. Dilihat dari Pertumbuhan Ekonomi, secara umum Kabupaten Konawe Utara pada Tahun 2009-2013 menggambarkan Laju Pertumbuhan Ekonomi yang cukup baik, hal ini ditunjukkan nilai PDRB dari sembilan sektor usaha (ekonomi) setiap tahun meningkat.
3. Hubungan Kemampuan Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah Kabupaten Konawe Utara tahun 2009-2013 menggambarkan hubungan *Sedang*. Hal ini dilihat dari Indikator Kinerja PAD seperti *Share* PAD terhadap total belanja *Rendah*. *Growth* PAD yang *Tinggi*. *Elastisitas* PAD terhadap PDRB yang menunjukkan angka lebih besar dari 1 (≥ 1)

dengan tingkat *Elastisitas Rendah*. Dan Indeks Kemampuan Keuangan (IKK) berada pada skala indeks 0,38 persen atau Tingkat Kemampuan Keuangan Daerah *Sedang*.

6.DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Priyo Hari, 2005. *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Jurnal Interdisipliner Kritis UKSW. Universitas Kristen Satya Wacana. Salatiga.
- _____, 2006. *Hubungan Antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi pada Kabupaten dan Kota Sejava – Bali)*. Simposium Nasional Akuntansi 9 Padang, Padang, 23 – 26 Agustus 2006 : hal. 1 – 22.
- _____, 2012. *Kemampuan Daerah Dalam Era Otonomi dan Relevansinya Dengan Pertumbuhan Ekonomi (Studi pada Kabupaten dan Kota Sejava – Bali)*. Jurnal Studi Pembangunan Interdisiplin, Vol. XII, No. 1, 2012 : hal. 1 – 19.
- Ahmadi, 2006. *Pertumbuhan Ekonomi dan Kebutuhan Investasi Kabupaten Karimun*. Tesis S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjad Mada, Yogyakarta. (Tidak dipublikasikan)
- Ariansyah, M., dkk., 2014. *Tingkat Ketergantungan Fiskal dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi di Kota Jambi*, Jurnal Perspektif Pembiayaan dan Pembangunan Daerah, ISSN : 2338- 4603, Vol. 1 No. 3, Januari-Maret 2014, hal 159 – 164.
- Arifin Kasman, dkk, 2015. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Di Provinsi Riau Periode 2005-2013*, Jurnal Economica, Vol. I No. 1 Januari 2015, hal. 87 – 104.
- Arsyad, Lincolin, 2004, *Ekonomi Pembangunan*, Bagian penerbit Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Pencetak Aditya Media, Cetakan Kedua, Yogyakarta.
- _____, 2013, *Pengantar Perencanaan Pembangunan Ekonomi Daerah*, BPFYOGYAKARTA, Edisi kedua, Cetakan Kelima, Yogyakarta.
- Arwati, Dini, dkk, 2013. *Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat*, Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan 2013 (Semantik 2013) Semarang, ISBN: 979-26-0266-6, 16 November 2013, hal. 498 – 507.

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan
Volume 1, Nomor 1, 2016
e-ISSN : 2502-5171

Azhar, MHD Karya Satya. 2008. *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebelum dan setelah Otonomi Daerah*. Tesis S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara. (Tidak Dipublikasikan).

Badan Pusat Statistik, 2009, *Data Strategis BPS*, Katalog BPS : 1103003. Di Cetak : CV. Nasional Indah, Jakarta.

_____, 2014. *Konawe Utara Dalam Angka 2009 – 2013*. Katalog BPS : 1101002.7410.

Badan Pusat Statistik, 2014. *Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten Konawe Utara Tahun 2009 – 2013*. Katalog BPS : 9218.7410.

_____, 2014, *Statistik Indonesia Statistical Yearbook of Indonesia*, Katalog BPS : 1101001. Jakarta.

Bank Indonesia, 2014, *Departemen Statistik Ekonomi dan Moneter, Bank Indonesia,- Pengertian PDRB*, data online : <http://www.bi.go.id>.

Bappenas, 2003, *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah : Tinjauan atas Kinerja PAD, dan Upaya yang Dilakukan Daerah*, Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. deddy@bappenas.go.id, diakses 5 Oktober 2015,

Batafor, Gregorius Gehi. 2011, *Evaluasi Kinerja dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten Lambata, Propinsi NTT*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Udayana Denpasar.

Bisma, Gde, I Dewa, dkk. 2010, *Evaluasi Kinerja Keuangan Daerah Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2003 – 2007*, Ganec Swara, Edisi Khusus, Vol. 4, No.3, Desember 2010, hal. 75 – 86.

Halim, Abdul, dkk, 2012. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*, Edisi 4, Jakarta : Salemba Empat.

Hamzah, Ardi, 2007, *Analisis Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan Belanja Pembangunan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi, Kemiskinan, dan Pengangguran : Pendekatan Analisis Jalur*. Jurnal Akuntansi dan Keuangan Indonesia, Vol. 4, No, 2, Desember 2007, hal 211-228.

Harafah, L. Muhammad, dkk. 2008. *Kesepadanan Pembangunan – Pemahaman Pembangunan Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia*, Penerbit : Universitas Unhalu Press, Cetakan Pertama, Kendari.

- Hariyanto, Tri Dedy, 2012, *Dampak Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Provinsi Jambi*, Tesis S2 Program Studi Fakultas Ekonomi, Program Magister Perencanaan dan Kebijakan Publik, Universitas Indonesia. (tidak dipublikasikan)
- Husen, Sharifuddin, 2011, *Pengaruh Pengeluaran Agregat dalam Mendorong Pertumbuhan Produk Domestik Bruto dan Implikasinya pada Kesejahteraan Sosial*, Jurnal Ekonomi Pembangunan, Volume 12, No 1, Juni 2011, hal 130-158.
- Husna, Asmaul, dkk. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dalam Pengembangan Wilayah Kabupaten Bintan Provinsi Kepulauan Riau*, JEMI, vol.4, no.2, Desember 2013.
- Indra, Rully, dkk. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Campuran untuk Manajemen, Pembangunan, dan Pendidikan*, Cetakan Kesatu, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Indriani, Susi, dkk, 2011, *Pengaruh Pengeluaran Konsumsi dan Investasi Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia*. Econom Sains – Volume I, X, Nomor 2, Agustus 2011. hal 95 – 105.
- Khan, Muhammad Azhar, dkk. 2012. *Measuring the Impact of Fiscal Variables on Economic Growth in Pakistan: New Light on an Old Problem*, JEL Classification Codes: O40, O53, Journal of Economic and Social Research Vol 14(2) 2012, page 53-82.
- Mahmudi, 2013. *Akuntansi Sektor Publik*, Cetakan Kedua, Yogyakarta : UII Press.
- Mukhlis, Imam, 2012. *Aliran Foreign Direct Investment dan Produk Domestik Bruto di Indonesia*, Jurnal JESP, ISSN 2086-1575, Vol. 4. No. 2, Nopember 2012, hal. 191-200.
- Prakarsa, Dwi, Febrian, 2014, *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Pengeluaran Pemerintah Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Studi Kasus Di Kabupaten Kota Jawa Timur Tahun 2008-2012)*, Jurnal Ilmiah, Jurusan Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya Malang.
- Prianto, Yanis, 2004. *Evaluasi Kemampuan Keuangan Daerah dalam Melakukan Pinjaman Tahun Anggaran 1997/ 1998 – 2002 (Studi Kasus Kabupaten Aceh Timur)*, Tesis S2 Magister Program Studi Magister Ekonomika Bidang Ilmu Sosial. (tidak dipublikasikan)

Prishardoyo, Bambang, 2008, *Analisis Tingkat Pertumbuhan Ekonomi dan Potensi Ekonomi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Pati Tahun 2002–2005*, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNNES, ISSN 1979–715X, Volume 1, Nomor 1, September 2008, hal.1-8

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang *Keuangan Negara*.

_____, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang *Perbendaharaan Negara*.

_____, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintah Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah*.

_____, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang *Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang *Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah*.

Rinaldi, Udin, 2012. *Kemandirian Keuangan dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah*, *Jurnal Eksos* ISSN : 1693 – 9093, Volume 8, Nomor 2, Juni 2012, hal 105 – 113.

Ronald, Andreas, dkk. 2010, *Analisis Kinerja Keuangan dan Pertumbuhan Ekonomi Sebelum dan Sesudah diberlakukannya Otonomi Daerah di Kabupaten Kulonprogo*, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, Vol. I, hal 31-42.

Rustiano, Dedy, 2008. *Analisis Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Tengah*, Makalah (tidak dipublikasikan).

Saharuddin. 2008. *Analisis Pengaruh Alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi*. Tesis S2 Sekolah Pascasarjana Universitas Haluoleo. (Tidak Dipublikasikan)

Sebayang, Karolina, Lesta, 2008. *Keterkaitan Desentralisasi Fiskal Sebagai Political Proses Dengan Tingkat Kemiskinan di Indonesia*, *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan*, Jurusan Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi UNNES, ISSN : 1979–715x, Volume 1, Nomor 1, September, 2008, hal. 63-69.

- Setiaji Wirawan, dkk, 2007, *Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi Pada Kabupaten dan Kota se Jawa – Bali)*, Simposium Nasional Akuntansi X, Unhas Makassar 26 – 28 Juli 2007, ASPP – 09, hal. 1 – 29.
- Shatti, Al Ali Sulieman, 2014. *The Impact of Public Expenditures on Economic Growth in Jordan*. International Journal of Economics and Finance, ISSN 1916 – 971X, E-ISSN 1916 – 9728, Vol. 6, No. 10; 2014, page 157 – 167.
- Situngkir, Freddy, dkk, 2014. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sumatera Utara*, Jurnal Ekonom, Vol 17, No 3, Juli 2014, hal. 125 – 137.
- Sudiarsa, I Made, 2004. *Pertumbuhan PDRB, Pergeseran dan Kesempatan Kerja Sektor Pertanian di Kabupaten Tabanan, Provinsi Bali (1997 – 2002)*, Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Gaja Mada, Yogyakarta. (Tidak Dipublikasikan).
- Sukirno, Sadono, 2007. *Ekonomi Pembangunan, Proses, Masalah dan Dasar Kebijakan*, Edisi Kedua, Percetakan Pajar Interpratama Offset, Jakarta.
- Sumarsono, Hadi, dkk. 2009. *Deliberate Inflation pada Kebijakan Desentralisasi Fiskal Jawa Timur dan Dampaknya Bagi Pertumbuhan Daerah*. JESP Vol. 1, No. 3, 2009. hal. 157 – 168.
- Supangat, 2004. *Analisis Kemampuan keuangan Daerah dalam Melakukan Pinjaman Daerah di Kabupaten Tegal*, Tesis S2 Program Studi Magister Ekonomi Pembangunan Bidang Ilmu-Ilmu Sosial. (tidak dipublikasikan).
- Suparmoko, M, 2002, *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*, Edisi Pertama, Penerbit Andi Yogyakarta.
- Suwarno, Endro, Agus, dkk. 2008. *Efektifitas Evaluasi Potensi Pajak Daerah Sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah*, jurnal Akuntansi dan Keuangan Volume 7, Nomor 2, September 2008, hal. 162-173.
- Swandewi, Agung, Anak Agung Istri, 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah Terhadap Kesenjangan Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*, ISSN : 2337-3067, e-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana 3.7 (2014) : hal. 356-376.
- Syaukani, H., HR, dkk, 2002, *Otonomi Daerah dalam Negara Kesatuan*, Pustaka Pelajar, cetakan II, yogyakarta.
- Taylor, E Janson, dkk. 2014. *Marginal Tax Rates and U.S. Growth : Flaws In The 2012 CRS Study*. Jurnal Cato, Vol. 34. No 1. hal. 33 – 46.

Jurnal Progres Ekonomi Pembangunan
Volume 1, Nomor 1, 2016
e-ISSN : 2502-5171

Thesaurianto, Kuncoro, 2007, *Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kemandirian Daerah*. Tesis S2 Program Pascasarjana Universitas Diponegoro. (Tidak Dipublikasikan).

Wahyuni, Sri, 2007. *Pengaruh Efektivitas dan Efisiensi Manajemen Keuangan Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Suatu Telaah Empirik di Kabupaten Karanganyar Tahun 1990 – 2005)*. Tesis S2 Program Studi Magister Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Sebelas Maret Surakarta. (Tidak Dipublikasikan).

Wenny, Cherrya Dhia, 2012. *Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan*. Forum Bisnis dan Kewirausahaan Jurnal Ilmiah STIE MDP, Vol. 2 No. 1 September 2012, hal. 39 – 51.

Witjaksono, Mit, 2009, *Pembangunan Ekonomi dan Ekonomi Pembangunan : Telaah Istilah dan Orientasi dalam Konteks Studi Pembangunan*, JESP Vol. 1, No. 1, 2009, hal 3 – 12.